



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB.I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS	
 LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG	11
 TAHUN 2023.....	
2.1. Evaluasi Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup	11
Kota Tanjungpinang.....	
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	14
Kota Tanjungpinang.....	
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	20
PD.....	
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	25
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan	25
Masyarakat	
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN	26
 KEGIATAN.....	
3.1. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup	26
Kota Tanjungpinang.....	
3.2. Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup	30
KotaTanjungpinang.....	
BAB IV. PENUTUP.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karuniaNYA penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026, sebagai pedoman utama Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama kurun waktu satu tahun. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan pengkoordinasian, pengambilan kebijakan pengendalian dan evaluasi pada bagian-bagian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat dilakukan dengan lebih baik.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.



Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tanjungpinang

Dr. AHMAD YANI, MM., M.Kes
Pembina Utama Muda
Nip. 19670918 198903 1 012



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen pembangunan. Mengacu dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap OPD diwajibkan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. Implikasinya adalah setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Dokumen Perubahan Renja.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (i) Rancangan Perubahan RKPD; (ii) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Tahapan penyusunan Renja perubahan mengikuti alur: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan Renja; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja; dan (3) Penetapan Perubahan Renja. Perumusan rancangan Perubahan

Renja Perangkat Daerah mencakup: (i) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; (ii) analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan (iii) penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



Berdasarkan Surat Edaran Walikota B/050.23/148/4.1/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang menyusun Perubahan Rencana Kerja yang sinergis dengan Perubahan RKPD tahun 2024, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas



- Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi



- Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah berdasarkan perubahan RKPD tahun 2024, sehingga perencanaan pembangunan di bidang urusan Lingkungan Hidup Tanjungpinang dapat sinergis dan berkelanjutan.



b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang tahun 2024.
2. Membuat acuan keberlanjutan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024 yang memuat hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan perubahan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

2.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RKPD disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024..

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT TAHUN BERKENAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan Triwulan II

Bagian ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisi tentang formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi rencana program dan kegiatan perangkat daerah dan Matrik Renja Perubahan Perangkat Daerah beserta UPT di bawah Perangkat Daerah.



BAB IV. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 s/d Triwulan II

Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024 mengacu pada Surat Edaran Walikota Kota Tanjungpinang Nomor B/050.23/148/4.1/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026 yang penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPD kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dan RKPD Kota Tanjungpinang tahun 2024. Matrik Evaluasi Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2023 hingga triwulan II terlampir.

Berdasarkan Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024, realisasi program/kegiatan dijelaskan berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Fisik sebesar 50,00% (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 0% (sangat rendah).
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Realisasi Fisik sebesar 55,10% (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 55,10% (sangat tinggi).
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat



- Daerah Realisasi Fisik sebesar 100 % (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 0 % (sangat rendah).
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Realisasi Fisik sebesar 26,58 % (rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 22,91 % (rendah).
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Realisasi Fisik sebesar 70,26 % (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 58,24 % (sangat tinggi).
 - f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Fisik sebesar 45,83 % (tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 43,04 % (tinggi).
 - g. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Realisasi Fisik sebesar 16 % (sangat rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 19,01 % (sangat rendah).
 - h. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 52,50 % (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 3,34 % (sangat rendah).
 - i. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 46,67 % (tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 0 % (sangat rendah).
 - j. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Realisasi Fisik sebesar 46,67 % (tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 0 % (sangat rendah).

- k. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 Realisasi Fisik sebesar 32,00 % (rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 0 % (sangat rendah).
- l. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 5,00% (sangat rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 32,59 % (sedang).
- m. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 0,00% (sangat rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 5 % (sangat rendah).
- n. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 51,49 % (sangat tinggi) dan realisasi Keuangan sebesar 57,94 % (sangat tinggi).
- o. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Realisasi Fisik sebesar 30,00% (sedang) dan realisasi Keuangan sebesar 0,00% (sangat rendah).



p. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Realisasi Fisik sebesar 22,68 (rendah) dan realisasi Keuangan sebesar 31,87 % (sedang).

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu:
 - a. Untuk program renstra yang target capaiannya terpenuhi Output yang ingin dicapai sudah terpenuhi, meskipun belum optimal, dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta anggaran yang terbatas.
 - b. Tersedianya beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam hal pencapaian target restru.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu : menambahkan anggaran yang dibutuhkan, menambahkan sumber daya manusia yang berkompeten serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai instansi yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya agar pelestarian lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Upaya yang dilakukan baik melalui pengawasan, penegakan hukum maupun pemantauan kualitas lingkungan serta pemulihan lingkungan. Selain itu, dengan dikeluarkannya

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki 4 (empat) bidang yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Walikota Tanjungpinang



Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, serta Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, mengakibatkan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup yang awalnya hanya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditambah dengan pengelolaan persampahan secara keseluruhan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara jelas digambarkan pada gambar di bawah ini.



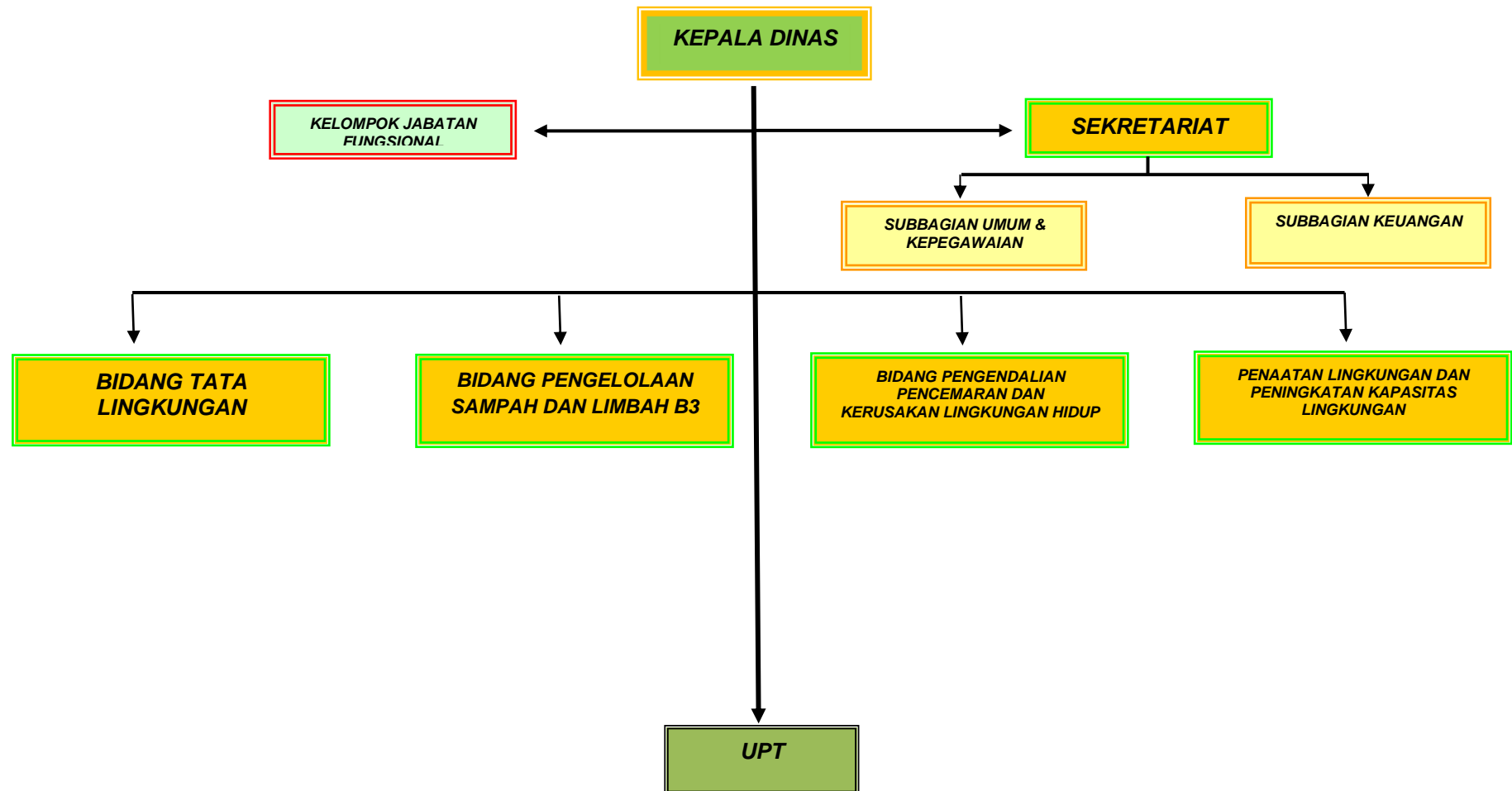
LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR

ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**





Keterangan :

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.

Pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sampai dengan tahun 2024 sebanyak 405 orang, terdiri dari 56 orang PNS, 1 orang PPPK, 25 orang Pegawai Tidak Tetap, 8 orang Tenaga Kantor, 1 orang Satpam, dan 314 orang Tenaga Kebersihan (THL).

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024**

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	S3	1			1
2	S2	2			3
3	S1	33	1	8	41
4	D3	9		3	12
5	SMA Sederajat	11		112	123
6	SMP Sederajat			83	83
7	SD Sederajat			111	111
8	Tidak Sekolah			31	31
Jumlah		56	1	349	405

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Juni 2024

Melalui Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 21 Juni 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa



Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.085.600.000,-. Belanja Operasi sebesar Rp. 25.901.277.328,- yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.902.691.318,- Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 17.998586010,-. Selanjutnya, Belanja Modal sebesar Rp. 5.562.107.039,- terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 5.562.107.039,-. Total Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 31.463.384.367,-.

Berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD dan indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Tanjungpinang mengacu pada indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tanjungpinang 2024-2026 dan pencapaiannya hingga triwulan ke II tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

No	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Sampai TW II	Catatan Analisis
1	KLH	63,232	63,10	NA	-
2	Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola	78,43	100	NA	-
3	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.539.295.000	4.000.000.000	676.540.000	R
	Retribusi Penyediaan Lokasi Pengolahan Lumpur Tinja / Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan/atau Layanan Penyedotan Kakus	111.600.000	80.000.000	49.920.000	ST
	Retribusi Pemakaian Alat	-	3.200.000	13.211.400	ST
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	-	2.400.000	480.000	S
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73,25	73,39	-	-



Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa beberapa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang kategori sangat tinggi dan rendah untuk capaian retribusi, sementara beberapa indikator yang realisasi capaian kerjanya masih belum tersedia. Dimana selanjutnya akan ditindaklanjuti pada triwulan III dan IV.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

✓ Tantangan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang di dalam 3 (tiga) tahun ke depan, akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan di tingkat pusat dan provinsi serta dipengaruhi oleh rencana pengembangan wilayah kota.

Tantangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang harus di hadapi antara lain :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan :

1. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
2. Tersedianya SDM sebagai Juru Pungut Retribusi Kebersihan
3. Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
4. Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan representative;
5. Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
6. Tersediaya dokumen Jakstrada;
7. Tersedianya TPS 3R dan bank sampah;
8. Tersedianya Kelompok Binaan Program Kampung Iklim menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;



9. Pelayanan Prima dalam Penerbitan Dokumen Lingkungan Hidup;
 10. Tersedianya data/informasi lingkungan hidup yang Update
- b. Kelemahan :
1. Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
 2. Keterbatasan lahan untuk TPA;
 3. Terbatasnya jumlah dan pengetahuan/kopetensi SDM yang bersifat teknis
 4. Sarana dan prasarana belum optimal dalam mendukung lancarnya pekerjaan;
 5. Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
 6. Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
 7. Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
 8. Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
 9. Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.
2. Faktor Eksternal
- a. Peluang
1. Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan kota yang maju, sehat dan bahagia;
 2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup;
 3. Adanya mitra kerja dan potensi peran serta masyarakat di Kota Tanjungpinang yang cukup banyak, untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, sehat dan bahagia;



4. Adanya Payung Hukum (Peraturan Perundangundangan) yang jelas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang;
- b. Tantangan
 1. Meningkatnya volume sampah kota akibat pertumbuhan penduduk;
 2. Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar retribusi sampah;
 4. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
 5. Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan RTH di Kota Tanjungpinang;
 6. Ketidakstabilan harga sampah sehingga menyebabkan keuntungan dan minat menabung sampah di Bank Sampah berkurang.

Implementasi program dan kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang secara substantif dikatakan berhasil jika memenuhi target indikator kinerja utama atau indikator RPJMD Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sesuai tugas dan fungsinya.

A. Penetapan Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah pada pasal 1 poin 2 bahwa Indikator Kinerja



Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan	IKLH	Untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup Kota Tanjungpinang
2.	Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola	Persentase Sampah Terkelola	Untuk mengetahui persentase sampah terkelola, baik persentase pengurangan sampah maupun persentase penanganan

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.3. Review terhadap Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan

Pada Rancangan awal, Rancangan dan Rancangan Akhir RKPD Perubahan yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan, dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 30.655.868.542,-. Matrik terlampir.



Pagu indikatif pada APBD 2024 sebesar Rp. 28.305.784.928 sedangkan Pagu APBD Perubahan 2024 sebesar Rp. 30.655.868.542 terjadi penurunan pagu sebesar Rp. 5.023.501.127.

2.4. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Kegiatan Prioritas Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjungpinang Timur

- Sumur Resapan sebanyak 4 titik di perumahan Bumi Air Raja RT 002 RW 003
- Biaya Insentif Pengurusan Proklamasi RW 012 sebanyak 1 Paket
- Insentif Pengurus Proklamasi sebanyak 10 orang di Proklamasi Wonosari dan Proklamasi Baiduri Wilayah Kelurahan Melayu Kota Piring
- Pembuatan Tugu Proklamasi di RW 12 Sebanyak 1 Buah
- Pengadaan Kaisar Bank Sampah RW 012 sebanyak 1 unit
- Pengadaan tong sampah untuk lokasi fasilitas umum sebanyak 7 unit
- Pengadaan meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, komputer dan printer pada RW 12 sebanyak 1 Paket

2. Kecamatan Tanjungpinang Kota

- Pengadaan Mototr kaisar Bank Sampah Sebaik Indah part 001 RW 006 sebanyak 1 Unit

3. Kecamatan Bukit Bestari

- Pengadaan alat Mesin Kompos Kp. Sei Sudip RT 002 RW 003 untuk 1 Kelompok
- Pengadaan Sekretariat proklamasi RW 002 RW 006 Kelurahan Tanjung Unggat Sebanyak 2 Paket

4. Kecamatan Tanjungpinang Barat

- Bantuan proklamasi untuk meningkatkan kesejahteraan



penggiat proklamasi se-Kelurahan Bukit Cermin sebanyak 4 Paket

- Bantuan Proklamasi berupa tugu proklamasi untuk menunjang proklamasi lestari sebanyak 1 unit
- Pelatihan pengelolaan Bank Sampah pada Karang Taruna Kelurahan Kampung Baru sebanyak 1 Kegiatan



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPD 2024-2026, dan isu strategis aktual.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD; bahwa definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dalam kegiatan operasional dinas dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria specific, measureable,



achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2026. Tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang selama 3 (tiga) tahun adalah **“Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan
2. Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola

Pertama, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan indikator tujuan dan sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan rumusan sbb:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Penjelasan :

IKA = Indeks Kualitas Air

IKU = Indeks Kualitas Udara

IKL = Indeks Kualitas Lahan

Kedua, Meningkatnya Jumlah Sampah Terkelola dengan indikator Persentase sampah terkelola dengan rumusan

$$\begin{aligned} & \% \text{ sampah terkelola} \\ &= \frac{\text{Berat Pengurangan sampah} + \text{Berat penanganan Sampah}}{\text{Berat Timbunan Sampah}} \times 100 \end{aligned}$$

3.2. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merencanakan Program dan Kegiatan yang mengacu pada visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Adapun program dan kegiatan dari Dinas lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan antara lain:



A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungs
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Alat Besar
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya



- Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJP/RPJMD

B. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota



- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat
 - Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
 - Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
- C. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



(PPLH)

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

G. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

H. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota



I. Program Pengelolaan Persampahan

- Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
 - Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang merupakan acuan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu 1 Tahun. Guna untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal diperlukan adanya partisipasi serta koordinasi yang sebaik-baiknya dari semua pihak serta aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang.

Perumusan dan penyusunan Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini telah diupayakan optimal dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang terhadap program dan kegiatan yang telah diusulkan dalam Renja Perubahan ini. Penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pagu indikatif pada APBD 2024 sebesar Rp. 28.305.784.928 sedangkan Pagu APBD Perubahan 2024 sebesar Rp. 30.655.868.542 terjadi penurunan pagu sebesar Rp. 5.023.501.127.

Demikian Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun dengan harapan kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diharapkan.



**LAPORAN REALISASI KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
PER JUNI TAHUN 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)				REALISASI FISIK	INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)			
			URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN (%)		URAIAN	TARGET	SATUAN	(%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			Rp 16.837.612.748	Rp 8.042.668.593	47,77%	51,87%				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp 76.234.000	Rp -	0,00%	50,00%				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp 66.234.000	Rp -	0,00%	50,00%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	100%
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 10.000.000	Rp -	0,00%	50,00%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp 7.902.691.318	Rp 4.354.595.866	55,10%	55,10%				
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp 7.902.691.318	Rp 4.354.595.866	55,10%	55,10%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58	orang/bulan	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 50.000.000	Rp -	0,00%	100,00%				
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp 50.000.000	Rp -	0,00%	100,00%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp 381.701.000	Rp 108.012.100	28,30%	22,91%				



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp 15.000.000	Rp 3.750.000	25,00%	25,00%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 10.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	Paket	100%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Rp 20.000.000	Rp 4.341.000	21,71%	25,00%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	100%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp 91.701.000	Rp 24.587.000	26,81%	26,81%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	Paket	100%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp 80.000.000	Rp 46.847.000	58,56%	58,56%	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100%
6	Penyediaan Bahan/Material		Rp 15.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 150.000.000	Rp 28.487.100	18,99%	25,00%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	100%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp 478.674.439	Rp 278.763.939	58,24%	70,26%				
1	Pengadaan Mebel		Rp 363.678.439	Rp 174.663.939	48,03%	50,00%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	100%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 114.996.000	Rp 104.100.000	90,52%	90,52%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 7.507.141.416	Rp 3.230.724.590	43,04%	45,83%				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp 107.000.000	Rp 8.232.840	7,69%	41,66%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100%



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 7.400.141.416	Rp 3.222.491.750	43,55%	50,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp 441.170.575	Rp 70.572.098	16,00%	19,01%				
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 100.000.000	Rp 33.386.848	33,39%	33,39%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	100%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp 261.170.575	Rp 28.371.850	10,86%	25,00%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	100%
	3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Rp 50.000.000	Rp 8.813.400	17,63%	17,63%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79	Unit	100%
	4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rp 30.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	100%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Rp 792.090.000	Rp 26.450.534	3,34%	52,50%				
	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Rp 792.090.000	Rp 26.450.534	3,34%	52,50%				
	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Rp 397.201.000	Rp 26.450.534	6,66%	90,00%	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	100%
	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Rp 394.889.000	Rp -	0,00%	15,00%	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	100%



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

3	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan			Rp 1.795.670.000	Rp -	0,00%	46,67%				
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp 1.697.410.000	Rp -	0,00%	40,00%				
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Rp 1.647.422.000	Rp -	0,00%	3,00%	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	Dokumen	100%
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Rp 30.000.000	Rp -	0,00%	80,00%	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	100%
	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Rp 19.988.000	Rp -	0,00%	37,00%	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22	Dokumen	100%
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Rp 98.260.000	Rp -	0,00%	53,34%				
	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Rp 68.260.000	Rp -	0,00%	100,00%	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1	Laporan	100%



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

	2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Rp 30.000.000	Rp -	0,00%	6,67%	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5	Titik	100%
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Rp 19.808.000	Rp -	0,00%	32,00%				
	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3			Rp 19.808.000	Rp -	0,00%	32,00%				
	1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Rp 19.808.000	Rp -	0,00%	32,00%	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	Laporan	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Rp 84.705.688	Rp 4.700.000	5,55%	32,50%				
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp 84.705.688	Rp 4.700.000	5,55%	32,50%				
	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Rp 30.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10	Dokumen	100%



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

	2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 54.705.688	Rp 4.700.000	8,59%	65,00%	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40	Badan Usaha	100%
6	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp 29.880.000	Rp -	0,00%	5,00%				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp 29.880.000	Rp -	0,00%	5,00%				
	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Rp 29.880.000	Rp -	0,00%	5,00%	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	100%
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Rp 129.479.312	Rp 66.675.000	51,49%	57,94%				
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp 129.479.312	Rp 66.675.000	51,49%	57,94%				
	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Rp 129.479.312	Rp 66.675.000	51,49%	57,94%	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20	Entitas	100%



8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp 25.000.000	Rp -	0,00%	30,00%				
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Rp 25.000.000	Rp -	0,00%	30,00%				
	1	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota		Rp 25.000.000	Rp -	0,00%	30,00%	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan	1	Pengaduan	100%
9	Program Pengelolaan Persampahan			Rp 11.749.138.619	Rp 3.743.967.019	31,87%	22,68%				
	Pengelolaan Sampah			Rp 11.749.138.619	Rp 3.743.967.019	31,87%	22,68%				
	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		Rp 654.990.800	Rp -	0,00%	15,00%	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	75	Kelompok	100%
	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Rp 9.672.556.819	Rp 3.256.027.419	33,66%	34,00%	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	50	Unit	100%
	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Rp 150.000.000	Rp -	0,00%	0,00%	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1	Dokumen	100%



RENJA PERUBAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024

	4	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional		Rp 1.271.591.000	Rp 487.939.600	38,37%	41,70%	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	31500	Ton	100%
TOTAL				Rp 31.463.384.367	Rp 11.884.461.146	37,77%	36,79%				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024
OPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%)		Keterangan		
						RKPD		APBD		I		II						Hambatan/ Permasalahan	Pendorong Kinerja	Upaya Tindak Lanjut
						6	7	8	11 = 7 + 8 + 9 + 10	12 = 11 / 6 * 100										
1	2	3	4	5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP				31.882.829.669		30.656.733.147		6.352.669.014		5.561.853.404		11.914.522.418	29,44	38,86			
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.882.829.669		30.656.733.147		6.352.669.014		5.561.853.404		11.914.522.418	29,44	38,86			
		2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				31.882.829.669		30.656.733.147		6.352.669.014		5.561.853.404		11.914.522.418	29,44	38,86			
		2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				17.298.086.415		16.030.961.528		5.514.788.308		2.557.841.557		8.072.629.865	31,87	50,36			
		2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		76.234.000		-		-		-					
		2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	66.234.000	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	Adanya Pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja Pada APBD Tahun Anggaran	Tersedianya Sarana dan Prasaran	Pembuatan Dokumen Perencanaan akan diperkirakan selesai pada bulan Juli

																	2024 sehingga terdapat penundaan belanja		
		2.11.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	50.000.000	1	10.000.000	1	0	-	1	-	100, 00	0,00	Adanya Pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja Pada APBD Tahun Anggaran 2024 sehingga terdapat penundaan belanja	Tersedianya Sarana dan Prasarana, serta koordinasi antar Bidang berjalan dengan baik	Pembuatan Dokumen Lakip masih dalam bentuk Soft Copy, serta akan dilakukan pencetakan laporan setelah pelaksanaan Automatic Adjustment
		2.11.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.509.831. 765		7.270.704. 037		3.236.315 .588		1.118.28 0.278		4.354.595. 866				
		2.11.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	58	7.509.831.7 65	696	7.270.704.0 37	17 4	3.236.315.5 88	17 4	1.118.280. 278	348	4.354.595.8 66	50,0 0	59,8 9		
		2.11.01.2 .05	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah				100.000.0 00		50.000.00 0		-		-		-				
		2.11.01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	100.000.00 0	5	50.000.000		0	5		5	-	100, 00	0,00		
		2.11.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.100.000. 000		381.701.0 00		23.295.00 0		108.012. 100		131.307.1 00				
		2.11.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	15.000.000				3.750.000	-	3.750.000	0,00	25,0 0		
		2.11.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	300.000.00 0	10	10.000.000				-	-	-	0,00	0,00		
		2.11.01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	50.000.000	3	20.000.000				4.341.000	-	4.341.000	0,00	21,7 1		

		2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	200.000.000	16	91.701.000				24.587.000	-	24.587.000	0,00	26,81			
		2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	150.000.000	2	80.000.000		1		46.847.000	1	46.847.000	50,00	58,56			
		2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	15.000.000				-	-	-	0,00	0,00			
		2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	300.000.000	12	150.000.000	23.295.000	5		28.487.100	5	51.782.100	41,67	34,52			
		2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250.000.000		304.010.500			-	278.763.939		278.763.939					
		2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	100.000.000	1	189.014.500		1		174.663.939	1	174.663.939	100,00	92,41			
		2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150.000.000	2	114.996.000		1		104.100.000	1	104.100.000	50,00	90,52			
		2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.213.254.650		7.507.141.416			2.229.154.322	1.008.236.540		3.237.390.862					
		2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	12	107.000.000	3	6.666.272,00	3	8.232.840	6	14.899.112	50,00	13,92			
		2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.013.254.650	12	7.400.141.416	3	2.222.488.050,00	3	1.000.003.700	6	3.222.491.750	50,00	43,55			
		2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.025.000.000		441.170.575			26.023.398	44.548.700		70.572.098					
		2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	2	300.000.000	2	100.000.000	0	14.797.398,00		18.589.450	-	33.386.848	0,00	33,39			

			Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
		2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	500.000.000	7	261.170.575	0	11.226.000,00	17.145.850	-	28.371.850	0,00	10,86			
		2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	150.000.000	79	50.000.000		11	8.813.400	11	8.813.400	13,92	17,63			
		2.11.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	75.000.000	1	30.000.000			-	-	-	0,00	0,00			
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				750.000.000		792.090.000		-	26.450.534		26.450.534	0,00	3,34			
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota				750.000.000		792.090.000		-	26.450.534		26.450.534					
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	350.000.000	1	397.201.000	0	0	26.450.534	-	26.450.534	0,00	6,66	SE No B/900/7/4.4.01/2024 TTg Pelaksanaan Automatic Adjustement Belanja APBD	surat kemendagri nomor 660/5113/Bangda dan no 600.11.2/8755/Bagda Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Nodis B/666.25/129/5.13.05/2024 Urgensi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 dan penyusunan KLHS RDTR Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044

		2.11.02.2.02.05	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	400.000.000	1	394.889.000	0	0	-	-	-	0,00	0,00	SE No B/900/7/4.4.01/2024 TTg Pelaksanaan Automatic Adjustement Belanja APBD	surat kemendagri nomor 660/5113/Bangda dan no 600.11.2/8755/Bagda Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	Nodis B/666.25/129/5.13.05/2024 Urgensi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025-2029 dan penyusunan KLHS RDTR Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2044
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.764.743.254		1.795.670.000	-	-	-	-	-	20,00	-			
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota				1.424.743.254		1.697.410.000	-	-	-	-	-					
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	453.243.254	1	1.647.422.000	0		-	-	-	0,00	0,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut : Belum dapat melaksanakan kegiatan dikarenakan adanya refokusing anggaran dan adanya edaran dari Setdako Tanjungpinang terkait penundaan sementara	Melaksanakan kegiatan sampling sesuai Mou dengan pihak ketiga	Mempersiapkan administrasi untuk kerjasama dengan pihak ketiga sesegera mungkin

																		dalam pelaksanaan kegiatanDAK : Masih menunggu JUKNIS dari Kementerian Lingkungan Hidup		
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	350.000.000	1	30.000.000	0			-	-	-	0,00	0,00	SE No B/900/7/4.4.01/2024 TTg Pelaksanaan Automatic Adjustement Belanja APBD	Merupakan indikator Kinerja DLH yaitu Meningkatnya.adanya Peraturan Direktur Jendral Pengendalian Iklim No P4/IPI/API/PPS .6/3/2021 Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Fungsi Ekosistem Dalam Pembangunan Berkelanjutan	Telah melaksanakan proses pembinaan dan pengimputan SRN harus tepat waktu hal ini dikarenakan link SRN berakhir 30 Mei 2024 seblm dilakukan verifikasi oleh Kementrian KLHK
		2.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen		621.500.000	22	19.988.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Belum dapat melaksanakan kegiatan dikarenakan adanya refocusing anggaran dan adanya edaran dari Setdako Tanjungpinang terkait penundaan sementara dalam pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan kegiatan sampling sesuai Mou dengan pihak ketiga	Mempersiapkan administrasi untuk kerjasama dengan pihak ketiga sesegera mungkin
		2.11.03.2.02	Penanggula ngan Pencemaran dan/atau Kerusakan				340.000.000		98.260.000				-	-	-					

			Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota																	
		2.11.03.2. 02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	100.000.00 0	1	68.260.000	0		1	-	1	-	100, 00	0,00	SE No B/900/7/4.4.0 1/2024 TTg Pelaksanaan Automatic Adjusment Belanja APBD	IKPLHD merupakan Kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahunnya	Telah dilaksanakanya SK Walikota terkait Tim Pelaksana dan sudah dilakukan pengumpulan Data serta dukungan dari BPKHTL dll
		2.11.03.2. 02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	42	240.000.00 0	5	30.000.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Merupakan anggaran yang disiapkan jika terjadi pencemaran apabila ada pengaduan masyarakat, sampai saat ini belum ada pengaduan masyarakat yang terjadi	Terjadinya pencemaran dimasyarakat baik pencemaran air maupun udara	Memonitor jika terjadi pencemaran di masyarakat
		2.11.05	PROGRAM PENGENDAL IAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50.000.00 0		19.808.00 0		-		-		-	86, 67	-			
		2.11.05.2 .01	Penyimpana n sementara Limbah B3				50.000.00 0		19.808.00 0		-		-		-					

		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	15	50.000.000	15	19.808.000	0		13	-	13	-	86,67	0,00	SE No B/900/7/4.4.0 1/2024 TTg Pelaksanaan Automatic Adjustment Belanja APBD	Surat edaran KLHK no. S.197/PSLB3/PLB3/PL B.3/3/2024 tentang kewajiban pelaporan PLB3 dan Non B3	1. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan schedulen yang telah dijadwalkan setiap bulannya; 2. Mengadakan bimbingan teknis terkait surat edaran yang ada terhadap para pelku usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 dan Non B3
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				320.000.000		84.705.688	-			4.700.000		4.700.000	32,50	5,55			
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				320.000.000		84.705.688	-			4.700.000		4.700.000					
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	24	70.000.000	10	30.000.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Sampai saat ini belum ada persetujuan teknis yang akan di nilai (penilaian substansi) sehingga belum perlu menggunakan tenaga ahli dari	Adanya dokumen persetujuan teknis yang akan dinilai	Mendorong pemrakarsa untuk mempercepat proses pengurusan dokumen persetujuan teknis yang akan dinilai

																	Kementerian Lingkungan Hidup		
		2.11.06.2.01.05	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	250.000.000	40	54.705.688	12		14	4.700.000	26	4.700.000	65,00	8,59	Surat Edaran terkait Penundaan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan rekanan.PPLH D yang ada hanya 1 sementara JF yang ada tidak sesuai nama jabatannya dengan tugas (seharusnya pejabat pengawas lingkungan hidup, namun dilantik dengan nama analis kebijakan) sehingga JF ybs tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasanKurang <p>pahaminya pegawai terhadap teknis pengawasan</p>	Semangat untuk mencapai target kinerja	Pekerjaan yang tidak berkaitan dengan rekanan dilakukan dengan tetap menyiapkan administrasi keuangan
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK			150.000.000		29.880.000	-			-		-	0,00	-			

			MASYARAKAT																	
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				150.000.000		29.880.000		-		-		-					
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	150.000.000	1	29.880.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Surat Edaran terkait Penundaan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pihak ketiga.	Indikator dalam permendagri 86/2017	Melakukan perancangan administrasi dan persiapan kegiatan
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				200.000.000		129.479.312		-		66.775.000		66.775.000	60,00	51,57			
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000		129.479.312		-		66.775.000		66.775.000					
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20	200.000.000	20	129.479.312	0		12	66.775.000	12	66.775.000	60,00	51,57	Surat Edaran terkait Penundaan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pihak ketiga.	Semangat untuk mencapai target kinerja. Surat KLHK dan DLHK Provinsi terkait penilaian Adiwiyata Mandiri, Nasional dan Provinsi	Melaksanakan pembinaan dan monitoring terlebih dahulu sambil menunggu pekerjaan yang berkaitan dengan pihak ketiga

		2.11.10	PROGRAM PENANGANA N PENGADUAN LINGKUNGA N HIDUP				50.000.00 0		25.000.00 0		-		-		-	0,0 0	-			
		2.11.1.02 .01	Penyelesaia n Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota				50.000.00 0		25.000.00 0		-		-		-					
		2.11.1.02. 01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Ko ta	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Di tangani	Dokume n	1	50.000.000	1	25.000.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Surat Edaran terkait Penundaan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pihak ketiga.	Semangat untuk mencapai target kinerja. Dorongan/desakan masyarakat terkait penanganan pengaduan	Melaksanakan pekerjaan- pekerjaan yang tidak berkaitan dengan pihak ketiga
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLA AN PERSAMPAH AN				11.300.00 0.000		11.749.13 8.619		837.880.7 06		2.906.08 6.313		3.743.967. 019	35, 61	31, 87			
		2.11.11.2 .01	Pengelolaan Sampah				11.300.00 0.000		11.749.13 8.619		837.880.7 06		2.906.08 6.313		3.743.967. 019					
		2.11.11.2. 01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelomp ok	75	1.000.000.0 00	75	654.990.80 0	0		68		68	-	90,6 7	0,00	Kurangnya kesadaran masyarakat	Motivasi / Insentif	Mengajukan usulan anggaran sosialisasi
		2.11.11.2. 01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Ko ta	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	50	7.000.000.0 00	468	9.672.556.8 19	0	692.392.00 0,00		2.563.635. 419	-	3.256.027.4 19	0,00	33,6 6	Umur Kendaraan menyebabkan sering alami kerusakan	Kendaraann Pengangkut yang Baru	Mengajukan usulan anggaran pembelian kendaraan pengangkut sampah

		2.11.11.2.01.08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	300.000.000	1	150.000.000	0			-	-	-	0,00	0,00	Belum ada informasi tanggal penilaian Adipura	Peranan Stake Holder untuk mempertahankan Piala Adipura	Mempersiapkan hal - hal yang akan diperlukan pada Penilaian Adipura
		2.11.11.2.01.20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	31500	3.000.000.000	31500	1.271.591.000	8189	145.488.706,00	8125	342.450.894	16.314	487.939.600	51,79	38,37	1. Kondisi alat berat yang sering rusak dan sudah tua; 2. Zona buang sudah mulai habis; 3. Pengalihan penugasan SDM untuk kegiatan baru (pembuatan paving blok); 4. Anggaran BBM hanya cukup untuk 5 bulan; 5. Anggaran pemeliharaan kendaraan yang tidak mencukupi	Pertambahan jumlah penduduk di Kota Tanjungpinang mengakibatkan bertampahnya jumlah sampah yang dihasilkan	1. Meminimalkan belanja barang sesuai dengan anggaran yang ada; 2. Pengajuan penambahan anggaran untuk BBM, pemeliharaan dan alat kebersihan; 3. Pengajuan Belanja Modal untuk Alat berat
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							31.882.829.669		30.656.733.147	JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					11.914.522.418					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																29,44	38,86			
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																R	T			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJU OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEKANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							35.679.369.669,00	28.305.784.928,00	30.655.868.542,00	-5.023.501.127,00							30.678.086.415,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35.679.369.669,00	28.305.784.928,00	30.655.868.542,00	-5.023.501.127,00							30.678.086.415,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							35.679.369.669,00	28.305.784.928,00	30.655.868.542,00	-5.023.501.127,00							30.678.086.415,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	0.2 100 % %	18.918.086.415,00	15.926.861.528,00	16.690.896.173,00	100.000.000,00							19.018.086.415,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan DLH yang efektif				-	1 Dokumen 73.39 Poin	100.000.000,00	76.234.000,00	57.091.000,00	-42.909.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	66.234.000,00	49.724.000,00	-276.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	10.000.000,00	7.367.000,00	-42.633.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DLH				-	100 %	7.509.831.765,00	7.270.704.037,00	7.902.691.318,00	392.859.553,00			-	- -	-		7.509.831.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/b ulan	58 Orang/b ulan	7.509.831.765,00	7.270.704.037,00	7.902.691.318,00	392.859.553,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.509.831.765,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Reformasi Biokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima				-	B Poin	420.000.000,00	50.000.000,00	49.662.000,00	-370.338.000,00			-	- -	-		420.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3,00 Paket	3,00 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10,00 Orang	5 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	49.662.000,00	-50.338.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30,00 Orang	30,00 Orang												

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	300.000.000,00	150.000.000,00	138.097.200,00	-161.902.800,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	750.000.000,00	199.910.500,00	478.674.439,00	-271.325.561,00			-	- -	-		850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20.00 Unit	1 Unit	100.000.000,00	189.014.500,00	363.678.439,00	263.678.439,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10.00 Unit	2 Unit	150.000.000,00	10.896.000,00	114.996.000,00	-35.004.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0.00 Unit	0.00 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	7.263.254.650,00	7.507.141.416,00	7.494.366.216,00	231.111.566,00			-	- -	-		7.263.254.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	200.000.000,00	107.000.000,00	94.224.800,00	-105.775.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.013.254.650,00	7.400.141.416,00	7.400.141.416,00	386.886.766,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			7.013.254.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	1.725.000.000,00	441.170.575,00	397.082.000,00	-1.327.918.000,00			-	- -	-		1.725.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2.00 Unit	2.00 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	82.431.000,00	-217.569.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7.00 Unit	7.00 Unit	500.000.000,00	261.170.575,00	249.926.000,00	-250.074.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50.00 Unit	79 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	34.725.000,00	-115.275.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	75.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan LH yang disusun				-	100 %	790.000.000,00	792.090.000,00	691.958.250,00	-580.000.000,00							210.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				-	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			-	- -	-		48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			48.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya				-	2 Dokumen	750.000.000,00	792.090.000,00	691.958.250,00	-58.041.750,00			-	- -	-		162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	397.201.000,00	347.112.350,00	-2.887.650,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	400.000.000,00	394.889.000,00	344.845.900,00	-55.154.100,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya dokumen/ laporan informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Meningkatnya Indeks Kualitas Air Meningkatnya Indeks Kualitas Udara				-	100 36.1 51.21 88.74 % Point Point Point	2.401.283.254,00	1.795.670.000,00	1.750.609.500,00	-801.283.254,00							1.600.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak Tersedianya data indeks kualitas air Tersedianya data Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tersedianya data indeks kualitas Udara				-	1 Kegiatan 39 Jumlah 4 Lokasi 5 Lokasi	1.424.743.254,00	1.697.410.000,00	1.678.682.500,00	253.939.246,00			-	- -	-		770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	453.243.254,00	1.647.422.000,00	99.860.000,00	-353.383.254,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			385.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	350.000.000,00	30.000.000,00	21.000.000,00	-329.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	1 Lokasi	0,00	0,00	1.540.888.000,00	1.540.888.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				22.00 Dokumen	22.00 Dokumen	621.500.000,00	19.988.000,00	16.934.500,00	-604.565.500,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-	100 %	340.000.000,00	98.260.000,00	71.927.000,00	-268.073.000,00			-	- -	-		330.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	68.260.000,00	47.782.000,00	-52.218.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				42.00 Titik	4 Titik	240.000.000,00	30.000.000,00	24.145.000,00	-215.855.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terpulihkannya media lingkungan yang tercemar/rusak				-	1445600 Ha	636.540.000,00	0,00	0,00	-636.540.000,00			-	- -	-		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	336.540.000,00	0,00	0,00	-336.540.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1.00 Kegiatan	1.00 Kegiatan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00							1.100.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	-	-		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Ha	15 Ha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				-	65 %	50.000.000,00	19.808.000,00	13.865.000,00	10.000.000,00							60.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya pengawasan terhadap kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3				-	15 Laporan	50.000.000,00	19.808.000,00	13.865.000,00	-36.135.000,00			-	-	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				15.00 Laporan	15.00 Laporan	50.000.000,00	19.808.000,00	13.865.000,00	-36.135.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang memperoleh pembinaan dan pengawasan				-	25 %	320.000.000,00	84.705.688,00	57.848.688,00	-110.000.000,00							210.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK				-	64 Usaha/Kegiatan	320.000.000,00	84.705.688,00	57.848.688,00	-262.151.312,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				24.00 Dokumen	8 Dokumen	70.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	-46.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				40.00 Badan Usaha	40.00 Badan Usaha	250.000.000,00	54.705.688,00	33.848.688,00	-216.151.312,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				-	2 Jumlah	550.000.000,00	29.880.000,00	21.587.000,00	-330.000.000,00							220.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannnya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	50 %	550.000.000,00	29.880.000,00	21.587.000,00	-528.413.000,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00	29.880.000,00	21.587.000,00	-128.413.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				15.00 Orang	15.00 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5.00 Lembaga	5.00 Lembaga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah adiwiyata tingkat Kota				-	50 %	200.000.000,00	64.704.312,00	114.139.312,00	0,00							200.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan lingkungan hidup yang diberikan ke masyarakat				-	1 Pengharg aan	200.000.000,00	64.704.312,00	114.139.312,00	-85.860.688,00			-	- -	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				20 Entitas	20 Entitas	200.000.000,00	64.704.312,00	114.139.312,00	-85.860.688,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani				-	100 %	50.000.000,00	25.000.000,00	17.265.000,00	10.000.000,00							60.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan				-	10 Jumlah	50.000.000,00	25.000.000,00	17.265.000,00	-32.735.000,00			-	- -	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				1.00 Pengaduan	1.00 Pengaduan	50.000.000,00	25.000.000,00	17.265.000,00	-32.735.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah				-	28 72 % %	11.800.000.000,00	9.567.065.400,00	11.297.699.619,00	-3.800.000.000,00							8.000.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Jumlah Bank Sampah Meningkatnya Jumlah Penanganan Sampah Meningkatnya Jumlah Pengurangan Sampah				-	10 Unit 20359,18 Ton 51625,06 Ton	11.700.000.000,00	9.567.065.400,00	11.297.699.619,00	-402.300.381,00			-	- -	-		7.900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				75.00 Kelompok	75.00 Kelompok	1.000.000.000,00	654.990.800,00	654.990.800,00	-345.009.200,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Melayu Kota Piring Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Barat, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				50.00 Unit	50.00 Unit	7.000.000.000,00	7.762.074.600,00	7.936.216.819,00	936.216.819,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Timur, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Pinang, Bukit Bestari, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				-	240 Ton	0,00	0,00	736.340.000,00	736.340.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				-	5,89 Persentase	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				-	90 Ton	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				1 Ton	1 Ton	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				31500.00 Ton	31500.00 Ton	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.220.152.000,00	-1.779.848.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-				-	-	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		J U M L A H							35.679.369.669,00	28.305.784.928,00	30.655.868.542,00	-344.585.087.823,01						30.678.086.415,00		